

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan.

4.1.1. *Rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya apabila ditelusuri sejarah historis mengadopsi ketentuan tentang sumpah advokat yang diatur dalam Pasal 187 RO (*Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie*) yang menyatakan: “Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus mengambil sumpah (janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk”, tanpa diberikan alasan hukum pada saat perumusan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, memberikan kewenangan atributif kepada Pengadilan Tinggi melakukan sumpah/janji advokat. *Rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya pada hakikatnya validitas/keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan.

4.1.2. Dengan mendasarkan landasan teoritik, perbandingan sumpah/ janji anggota kepolisian dan kejaksaan, pengangkatan advokat di negara Rusia, sekaligus amanat pembentuk UU Advokat dalam konsideran menimbang huruf (b), Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat lebih tepat dilakukan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri, dengan

ketentuan advokat yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat dengan benar, telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara profesional.

4.2. Saran

- 4.2.1. Kepada Badan Legislatif untuk melakukan Perubahan UU Advokat dengan menambahkan *ratio legis* dari sumpah/janji advokat merupakan landasan validitas, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan, dalam rangka mengemban profesi yang mulia (*officium nobile*), menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- 4.2.2. Kepada Badan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terkait keharusan advokat bersumpah atau berjanji menurut agamanya tidak lagi di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. Sumpah atau janji Advokat tersebut cukup dilakukan di lingkungan organisasi advokat, setelah advokat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara selektif dan ketat.

DAFTAR BACAAN.

- A Patra M Zein. *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Sentralisme Pruduction, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Abdul Djalal, H. A, *Ulumul Qur'an*, Dunia Ilmu, Jakarta, 1998.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta. 2016.
- Achmad Ali, Wiwie Haryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Achmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka. Makasar. 2020.
- Achmad Sodiki, dkk, *Hukum Sebagai Pancaran Moral*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2012.
- Agus Salim Andi Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Andi Sofyan. Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2014
- Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2016.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada, Jakarta , 2016.
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Prenanada Media Group. Jakarta. 2019
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Pengantar Studi Hukum Konstitusi), diterjemahkan oleh Nurhadi, Nusa Media, Bandung, 2007.
- Ateng Safrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

- Bagir Manan, *dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992.
- Binziad Kadafi et al, *Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. Jakarta 2002,
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul, MN: West Publishing Co., 1999.
- B.S. Hempenius Van Dijk, *Procesgids Hof Van Friesland, De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel*. Verlorenh. Hilversum City. 2004.
- B.M. Newman & P.R. Newman, *Development Through Life*, Brooks/ Cole Publishing Company, California, 1991
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman. 2017.
- Daniel Lerner, *The Human Meaning Of The Social Science*, World Publishing, New York, 1959
- Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Dody Nur Andriyan, "Laissez Faire", *Majalah Resonansi*, tanggal 24 Maret 2009.
- D.K. Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2005
- Edi Setiadi, Kristian, *Sisitem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017.
- Endang Syaifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran tentang, Islam dan Umatnya*, Pelajar Bandung, Bandung, 1969.
- Emile Durkheim, *Moral Education: A Study In A Theory & Application Of The Sociology Of Education*, Courier Corporation, New York, 2011.
- Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- E.Y Kanter. SH. *Etika Profesi Hukum sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta. 2001.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Manhaji Medan. 2020.
- Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Di Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Prenada, Jakarta , 2013.
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Gramedia, Jakarta, 2011.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*. Kanisius, Yogyakarta; 1987.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Frans Magnis Suseno, *Berfilsajat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Friedmann, W, 1990. *Legal Theory (Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teoriteori Hukum)* (Susunan I, II, dan III), diterjemahkan oleh Muhammad Arifin,, Zajawali, Jakarta, 1990).
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- H. A. Sukris Sarmadi. MH. *Advokat litigasi & Non litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini..* Mandar maju, Bandung, 2009
- H. Kahan Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Rineka Cipta, Bandung, 1995.
- H.L.A. Hart, "*The Concept of Law*", edisi kedua, oxford; oxford University press, 1994.
- Hans Kelsen. Teori umum tentang Hukum dan Negara. (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law And Statute (ne York, Russel and Russel. 1971)* cetakan Februari 2011. Penerbit Nusa Media. Bandung, 2011.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.

- Henry Campbell Black, "*Black's Law Dictionary*" .Abridged Fifth Edition, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.. 1983
- Henry Campbell Black, "*Black'S Law Dictionary*" West Publishing, 1990.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary* ,St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta:2010,
- Irwan Jasa Tarigan . *Narkotika dan Penanggulangannya*. Deepublish. Yogyakarta. 2017.
- Jandi Mukianto. *Pinsip dan Praktik Banduan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok 2017.
- Jenny Teichman, *Etika sosial*, penerjemah, A. Sudiarja. a Kanisius, Yogyakarta. 1998.
- J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukumu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *ASurvey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998
- J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta:1996
- Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", Akses pada PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial: <http://www.docudesk.com>, tanggal 5 Agustus 2015.
- Jimly Assiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2016.
- John Gilissen, Frits Gorle. Disadur oleh. F. Tengker. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan kelima Oktober 2011. Penerbit Refika Aditama. 2011.
- John Rawls. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2019.
- Jhon Sinclair, Collins Cobuild, *English Language Dictionary*. William Collins Sons & Co., Ltd., London. 1987.

- Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman. 2019.
- Johan Jasin. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru. 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing. Malang 2008.
- Kamal Hossain, Leonard F.M. Besselink, Haile Selassie Gebre Selassie And Edmond Volker (ds), *Human Right Commission And Ombudsman Office National Experience Throughout The World*. Kluwer Law International, Netherland. 2000.
- King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- K. Bertens. *Pespektif Etika Esai-Esai tentang Masalah Aktual*. Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Lang Fang, *Imlek tanpa Gus Dur*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. 2012.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1989.
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish. Yogyakarta. 2015.
- Lawrence Steinberg, *Adolescence: Sixth Edition*, Mc Grawhill. Inc, New York, 2002
- Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Luthfi Widagdo Eddyono, *Memaknai Konstitusionalisme Indonesia*. Aura, Bandar Lampung, 2018.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers. Rajagrafindo Persada, Depok 2017
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, tanpa penerbit, Yogyakarta, 1989.

- Marojahan JS Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung. 2018.
- Matthew Kramer, *Where Law and Morallity Meet*, Oxford University Press, 2004.
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005
- M.Yahya Harahap. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaana Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Moh. Mahfud M.D. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali pers, Jakarta 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- Mohammad Nadzib Asrori. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Deepublish, Yogyakarta. 2018.
- Montesquieu, *The Spririt of law Dasar-Dasar Ilmi Hukum dan Ilmu Politik*. (diterjemahkan dari karya Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press. 1977), Nusa Media.
- M. Usman, *REKONSTRUKSI TEORI HUKUM ISLAM ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. PT. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta. 2015.
- Muchammad Chakim, Marjan Miharja. *Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat Pasca Diterbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014 Dan Nomor: 36/PUU-XIII/2015*, Qiara Media, Pasuruan. 2019.
- Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*, Jakarta Mihtab, 2004.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung. CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mu'tadin, *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

- M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam antara Al-Ghazali dan Kant*, (Terjemahan.), Bandung: Mizan, 2002.
- Nazarudin Zainun. *Wacana Warisan, Pelancongan Dan Seni Dalam Kearifan Tempatan*, Universitas Sains Malaysia Press, Pulau Pinang Malaysia. 2015
- Pataniari Siahan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Phillipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang". *Yuridika*, Nomor 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.
- Phillipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintah (*bestuurbevoegdheid*)". *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998
- Philippus M. Hadjon dkk. "Pengantar Hukum Administrasi Negara" Cet. 11. Gadjah Mada University Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002.
- Pitono Soeprapto (editor). *Etik dan Hukum Di Bidang Kesehatan*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga University Press. Surabaya. 2002.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, "Kamus Ilmiah Populer", Penerbit Arkola, Surabaya, 1994.
- Prajudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi Negara" Cet. 9 Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki. SH. MH. LLM, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, edisi revisi, Jakarta, 2005.
- Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 2012.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Ridwan HARI. "Hukum Administrasi Publik", Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

- Ronald Saija , *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Sleman. 2019.
- Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2010.
- Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo. *Membangun polisi sipil: perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Sacipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Sayyid Kuthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 6*, (penerjemahan As-Ad. Yasin), Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Prenadamedia. Jakarta. 2013.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenadamedia. Jakarta. 2014.
- Sunarmi. *Sejarah Hukum*, Kencana, Jakarta. 2016.
- Suparto Wijoyo , *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga Press, Surabaya, 2017.
- Supriadi, *Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Majalah Konsitusi Desember 2009, *Pengadilan Tinggi Wajib Mengambil Sumpah Advokat*, Nomor 35-Desember 2009
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009.
- Toman Sony Tambunan. *Glosarium istilah pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2016.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya.2010.

V.Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta. 2011.

Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Medpress Digital, Yogyakarta,2015.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977.

Yarman, Nurti Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017.

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008,

Zainal Arifin Housen. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Setara Pess. Malang. 2016.

Zulfajri, *Visi dan Misi Kemandirian*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi :

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 067/PUU-II/2004;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015;

Surat Edaran dan Keputusan :

Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Jurnal.

Arif Setiawan, Lucky Suryo Wicaksono, Siti Anisah, Eko Rial Nugroho, *Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Di Indonesia Dan Amerika Serikat, UB.ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017.*

Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.*

Fabian M. Rompis, *Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/Nomor2/Apr-Jun/2013.*

Fiska Maulidian Nugroho, *Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. Jurnal Rechildee, Fakultas Hukum Trunojoyo, Vol. 11. Nomor 1, Juni 2016.*

Hamka Siregar . *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Politik Islam AL-‘ADALAH IAIN Bone, Vol. XII, Nomor 4, Desember 2015*

- H. Jamaluddin M. Marky, M.Si, Lc. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-sumpah-dalam-perspektif-islam> diunduh pada tanggal 17 Desember 2019.
- Mardjono Reksodiputro, “Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?,” *JENTERA Jurnal Hukum*, Edisi 19, Tahun V, (April – Juni 2009),
- Mohammad Mahrus Ali, *Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 194*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Mochamad Mansur. *Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019.
- Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September– Desember, 1997
- Salman Luthan, “*Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM NOMOR 4 VOL. 19 UII, Oktober 2012.
- Samuel Saut Martua Samosir, *Sejarah, Sumber dan Asas-asas Hukum Perdata*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.
- Siti Malikhatul Badriyah. *Penemuan Hukum (Rechtsviding) dan Penciptaan Hukum (Rechtscheping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40, Nomor 3. Juli 2011.
- Wika Yudha Shanty, *Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang , Vol. 5, Nomor2 Desember 2014 Wika Yudha Shanty, *Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang , Vol. 5, Nomor2 Desember 2014.

Internet/Website :

- <https://studihukum.wordpress.com/category/34-profesi-hukum/>.
- <http://pa-purworejo.go.id/web/sumpah-advokat-sebagai-unifikasi-integritas-kehakiman/>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19761/ari-yusuf-amir-jangan-gadaikan-reputasi-advokat-dengan-membohongi-klien/>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de0b3637673c/mk--peradi-wadah-tunggal-melekat-8-kewenangan/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10056/kronologis-perjalananundangundang-advokat/>, di unduh pada tanggal 01 Juni 2020.

<https://radarcom.id/2019/08/13/sejarah-perkumpulan-advocaten-indonesia-pai/>.

<http://www.pa-poso.go.id/tentang-pengadial/fungsi-dan-tugas-pengadilan>.

<https://www.jw.org/id/perpustakaan/majalah/w20030115/Pertanyaan-Pembaca/>.